

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini, laju pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan seluruh Indonesia mendekati 3 juta per tahun. Dengan tingkat perkembangan ini, dimasa yang akan datang diproyeksikan sekitar 60 % penduduk Indonesia akan berdomisili di kawasan perkotaan. Dengan semakin pentingnya peranan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pembangunan perkotaan seyogyanya diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan nasional yaitu stabilitas ekonomi yang mantap, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan budaya bangsa, pemerataan, dan peningkatan kualitas lingkungan. Tanpa pengaturan pemerintah, pertumbuhan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi kawasan perkotaan akan dipengaruhi oleh sistem ekonomi pasar yang produk spasialnya adalah pola perkembangan mempita (*ribbon development*) dan aglomerasi pertumbuhan pada kota-kota besar. Hal ini akan menyebabkan menurunnya efektivitas fungsi dan peran kota sebagai katalisator pengembangan wilayah, maka dari itu diperlukan suatu rencana dalam pengembangan wilayah atau kota dalam mengatasi agar tidak terjadinya permasalahan tersebut. (*wikipedia-indonesia.com, 2008*)

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah/kota tidak akan terlepas dari kegiatan yang ada di dalamnya. Sehingga dibutuhkan suatu konsep perencanaan dalam pembangunan/pengembangan wilayah/kota yang memadai dan berfungsi sebagai penyeimbang perkembangan dan pertumbuhan wilayah serta kegiatan dengan keberadaan lingkungan sekitarnya.

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Pembangunan juga dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik

atau lebih manusiawi, serta pembangunan juga merupakan suatu kegiatan dalam mengadakan atau membuat/mengatur sesuatu yang belum ada. Menurut Todaro (2000) suatu pembangunan harus memenuhi tiga konsep yaitu kecukupan (*sustainance*) memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jatidiri (*self-esteem*), serta kebebasan (*freedom*) untuk memilih. (Rustiadi, 2009 : 119)

Pembangunan merupakan suatu proses atau merupakan suatu fenomena perubahan. Suatu proses perubahan akan selalu terjadi, baik dengan sendirinya ataupun karena adanya intervensi yang merujuk kepada hal tersebut. Dalam pembangunan suatu masyarakat atau bangsa, dengan merujuk kepada keinginan – keinginan yang disepakati masyarakat tersebut, dilakukan intervensi kepada berbagai bidang dengan tujuan agar perubahan yang sesuai dengan keinginan yang disepakati terwujud.

Dalam perkembangan suatu kota/wilayah akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari lingkup internal maupun lingkup eksternalnya. Faktor eksternal biasanya berupa keterkaitannya dengan kota – kota atau wilayah lain serta daerah *hinterland* disekitarnya. Keterkaitan ini bisa diwujudkan sebagai suatu bentuk sistem kota – kota yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan barang, jasa, orang, dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Dalam suatu sistem perkotaan, kota menjadi unsur atau elemen utama dan merupakan simpul – simpul atau *nodes*, kemudian hubungan atau interaksi antar *nodes* ini merupakan faktor pembentuk sistem dari perkotaan tersebut yang mewujudkan sebagai aliran – aliran dalam suatu jejaring. Terdapat beberapa faktor penting yang diemban dalam interaksi atau keterkaitan sistem pusat-pusat perkotaan ini diantaranya pertama mewujudkan interaksi spasial. Manusia kegiatannya terpisah – pisah dalam ruang, sehingga penting untuk menghubungkan interaksi ini. Kedua dari interaksi atau keterkaitan ini dapat memungkinkan adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam sistem perkotaan. Ketiga adalah sebagai wahana untuk pengorganisasian kegiatan dalam ruang, dan keempat adalah dalam memfasilitasi serta menyalurkan perubahan – perubahan dari satu simpul ke simpul lainnya.

Dalam lingkup wilayah Kabupaten Bandung sebagai salah satu bagian dari sistem Metropolitan Bandung, terdapat banyak ketidaksesuaian antara rencana,

pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatannya. Ketidaksesuaian ini memberikan dampak berupa pemanfaatan ruang yang kurang efisien dan kurang optimal, serta menyebabkan pula konflik kepentingan antar sektor dan wilayah dalam penataan ruangnya maka dari itu perlu dilakukannya suatu upaya penataan ruang secara integrasi yang menyangkut penataan ruang di Kabupaten Bandung. (Penataan Ruang Metropolitan Bandung, 2003 : 1)

Secara umum pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung mengalami kenaikan yang cukup pesat dimana dari tahun 2001-2005 rata – rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3,3% dengan penambahan yang lebih dari 100.000 jiwa pertahun (*RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007*). Dengan melihat kecenderungan tersebut maka laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Bandung cukup tinggi dan mengindikasikan kandungan potensi sumber daya manusia yang relatif besar. Namun dengan melihat konsentrasi penduduk umumnya tersebar di wilayah tengah dan utara, serta di wilayah – wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Sedangkan persebaran penduduk di wilayah barat dan selatan Kabupaten Bandung relatif rendah. Ini menunjukkan adanya suatu ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bandung tersebut (*RTRW Kabupaten Bandung 2007*). Berdasarkan kepada teori yang diungkapkan oleh Tarigan dalam bukunya tentang Perencanaan Pembangunan Wilayah bahwa penduduk merupakan faktor penentu dalam banyaknya permintaan terhadap bahan konsumsi yang disediakan, sehingga semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah maka akan semakin banyak pula fasilitas pelayanan yang diperlukan pada wilayah tersebut. (Tarigan, 2005 : 185). Dilihat dari pernyataan tersebut jelas bahwa pusat pelayanan di Kabupaten Bandung tidak memenuhi konsep pembangunan yang mengarah kepada terjadinya pemerataan.

Selain dari pada itu pada tahun 2007, terjadi pemekaran pada Kabupaten Bandung yang menjadikannya terbagi ke dalam dua wilayah yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2007 yaitu tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Dengan terjadinya pemekaran tersebut maka secara otomatis Kawasan Kabupaten

Bandung menjadi berkurang yang kemudian akan berpengaruh terhadap sistem pusat – pusat pelayanannya yang berubah.(*bandungkab.go.id*)

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2003	2004	2005	2006	2007
1	Soreang	138.311	143.472	147.584	151.739	90.989
2	Katapang	115.050	118.775	122.038	126.214	88.794
3	Kutawaringin					83.542
4	Ciwidey	70.505	73.584	75.907	78.142	67.628
5	Pasirjambu	73.655	75.268	77.591	79.711	74.965
6	Rancabali	46.311	47.850	49.113	50.761	46.019
7	Banjaran	98.547	102.188	105.268	108.995	101.204
8	Pameungpeuk	59.217	60.887	62.634	64.676	62.212
9	Cangkuang	53.135	54.952	56.638	58.607	58.460
10	Arjasari	81.772	84.698	87.194	89.783	79.131
11	Cimaung	66.934	68.395	70.295	72.548	70.057
12	Pangalengan	128.208	131.936	135.768	139.573	128.120
13	Baleendah	169.074	172.956	178.060	184.025	173.180
14	Dayeuhkolot	105.595	109.810	113.082	116.783	101.525
15	Bojongsoang	73.940	76.820	78.951	81.583	80.101
16	Majalaya	141.469	145.446	149.910	154.731	139.638
17	Solokanjeruk	72.404	73.727	75.884	78.258	71.783
18	Ciparay	134.320	137.910	142.008	146.529	138.712
19	Pacet	92.868	96.006	98.909	101.817	97.726
20	Kertasari	62.405	64.154	66.032	68.323	62.546
21	Paseh	105.367	107.876	111.114	114.634	113.072
22	Ibun	68.104	70.020	72.013	73.967	71.463
23	Cileunyi	117.766	121.975	125.580	129.323	131.940
24	Rancaekek	145.467	150.661	155.004	159.981	146.909
25	Cicalengka	96.114	99.085	101.948	105.085	99.665
26	Nagreg	42.761	44.758	45.963	47.474	45.473
27	Cikancung	70.275	72.246	74.211	76.418	76.349
28	Margahayu	107.060	111.250	114.510	119.009	94.867
29	Margaasih	111.655	115.932	119.442	123.691	113.749
30	Cilengkrang	38.104	39.305	40.499	41.734	40.521
31	Cimendan	85.945	88.053	90.708	93.970	89.701
Jumlah		2.772.338	2.859.995	2.943.858	3.038.084	2.840.041

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2004-2008

Dilihat dari kondisi yang dikaitkan dengan teori pembangunan/pengembangan wilayah yang diungkapkan diatas, maka menurut penulis perlu dilakukannya suatu penentuan pusat pelayanan yang optimal agar terdapat suatu ketegasan dalam kebijaksanaan pengembangan wilayah dimasa yang akan datang dengan pembangunan wilayah yang lebih merata. Oleh karena itu dalam upaya untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang merata di Kabupaten Bandung maka penulis menganggap perlu dilakukan studi mengenai **“Studi Penentuan Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung”** yang bertujuan untuk dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan Kabupaten Bandung itu sendiri. Sedangkan bagi swasta dapat membantu dalam berinvestasi di Kabupaten Bandung dimana dapat dilihat dari pusat-pusat pelayanannya. kemudian manfaat bagi masyarakat adalah dapat terjadinya pemerataan perkembangan wilayah yang berarti pemerataan kemakmuran masyarakat pada umumnya di wilayah Kabupaten Bandung.

1.2 Perumusan Persoalan

Berdasarkan atas tinjauan dari kenyataan yang terjadi sekarang ini, bahwa terdapat beberapa persoalan umum yang berkaitan dengan perkembangan wilayah yang terjadi di Kabupaten Bandung diantaranya adanya ketimpangan pembangunan/pengembangan wilayah Kabupaten Bandung yang terkonsentrasi pada bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi, sehingga **permasalahan pokok dalam studi ini adalah terjadinya penyebaran pusat-pusat pelayanan yang tidak merata yaitu terkonsentrasi pada Wilayah Bagian Utara Kabupaten Bandung**, dimana hal ini dapat dilihat dalam Rencana Struktur Kabupaten Bandung. Dengan adanya perbedaan tersebut maka dalam pengembangan wilayah oleh para ahli dianggap masalah yang ditimbulkan oleh adanya gejala *“regional inequality”*, yaitu perbedaan dalam tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta adanya perbedaan tingkat pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Melihat adanya ketimpangan tadi maka jelas untuk pembangunan di Kabupaten Bandung terkonsentrasi pada satu bagian wilayah yaitu pada bagian utaranya saja, sedangkan pada bagian selatan tidak begitu pesat pembangunannya yang

mengakibatkan adanya konsentrasi penduduk yang tidak merata. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I.2
Keterkaitan Penduduk dan Hirarki Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten Bandung

No.	Kecamatan	Kepadatan (jiwa/ha)	Rencana Struktur Ruang
1	Soreang	49	Hirarki IIa
2	Katapang	77	Hirarki IV
3	Kutawaringin	25	Hirarki IV
4	Ciwidey	12	Hirarki III
5	Pasirjambu	3	Hirarki IV
6	Rancabali	3	Hirarki IV
7	Banjaran	35	Hirarki IIb
8	Pameungpeuk	67	Hirarki IV
9	Cangkuang	12	Hirarki IV
10	Arjasari	14	Hirarki IV
11	Cimaung	18	Hirarki IV
12	Pangalengan	6	Hirarki III
13	Baleendah	39	Hirarki IIb
14	Dayeuhkolot	70	Hirarki III
15	Bojongsoang	29	Hirarki III
16	Majalaya	73	Hirarki IIb
17	Solokanjeruk	28	Hirarki IV
18	Ciparay	21	Hirarki III
19	Pacet	10	Hirarki IV
20	Kertasari	4	Hirarki IV
21	Paseh	16	Hirarki IV
22	Ibun	14	Hirarki IV
23	Cileunyi	46	Hirarki IIb
24	Rancaekek	41	Hirarki IIb
25	Cicalengka	20	Hirarki IIb
26	Nagreg	13	Hirarki IV
27	Cikancung	20	Hirarki IV
28	Margahayu	134	Hirarki III
29	Margaasih	10	Hirarki III
30	Cilengkrang	13	Hirarki III
31	Cimendan	21	Hirarki III

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bandung gambar 1.1

Dari tabel dan gambar diatas dapat dilihat bahwa daerah yang berhirarki tinggi serta dengan kepadatan penduduk cukup tinggi terdapat pada daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang berada di Bagian Utara Wilayah Kabupaten Bandung, seperti Soreang, Banjaran, Majalaya, Baleendah, Cileunyi, Rancaekek, Cicalengka. Serta untuk yang berhirarki terendah terdapat di wilayah bagian selatan seperti Rancabali, Pasirjambu, Kertasari, Cimaung, Ibum, dan Pacet.

Persoalan atau permasalahan diatas yang berada di Kabupaten Bandung merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan serta berkesinambungan, oleh karena itu penentuan persoalan atau permasalahan tersebut diperlukan suatu peninjauan yang dilakukan secara komprehensif dan teliti. Dari persoalan atau permasalahan tersebut, maka muncullah suatu pertanyaan penelitian yaitu **Bagaimana pola pengembangan pusat – pusat pelayanan pada wilayah Kabupaten Bandung dalam pemerataan pengembangan wilayah di Kabupaten Bandung?**. Dari pertanyaan penelitian tersebut kemudian berkembang dan memunculkan juga pertanyaan yang berkaitan/berhubungan dengan pusat – pusat pelayanan di Kabupaten Bandung yaitu: “Bagaimana Sistem Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung yang sebenarnya (Eksisting)??”

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan atas latar belakang dan perumusan persoalan yang telah dikemukakan sebelumnya maka Studi Mengenai Pemerataan Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung ini bertujuan untuk **menentukan pusat-pusat pelayanan serta pola pengembangan pusat-pusat pelayanan tersebut di Wilayah Kabupaten Bandung yang lebih optimal dalam rangka pemerataan pengembangan wilayahnya.**

1.3.2 Sasaran

Guna mencapai tujuan yang telah diungkapkan diatas maka ditentukanlah suatu sasaran yang merupakan tahapan – tahapan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk sasaran yang akan dilakukan adalah :

- Teridentifikasinya pusat-pusat pelayanan eksisting.
- Teridentifikasinya tingkat pengaruh dari pusat-pusat pelayanan eksisting.
- Teridentifikasinya hirarki pusat-pusat pelayanan
- Teridentifikasinya pola pengembangan pusat-pusat pelayanan yang optimal

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup Wilayah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bandung yang terletak antara 6°41' - 7°19' lintang selatan dan 107°22' - 108°5' bujur timur, pada ketinggian antara 110m - 2.249m diatas permukaan laut dengan luas wilayah sekitar 174.911,71 Ha. Kabupaten Bandung terbagi atas 31 kecamatan (pasca Pemekaran) dan 274 desa (termasuk kelurahan) pasca pemekaran dengan pusat pemerintahan di Kecamatan Soreang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel I.3 dibawah ini.

Tabel I.3
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Di Kabupaten Bandung

No	Kecamatan	Jml. kel/desa
1	Soreang	10
2	Katapang	10
3	Kutawaringin	11
4	Ciwidey	7
5	Pasirjambu	10
6	Rancabali	5
7	Banjaran	10
8	Pameungpeuk	6
9	Cangkuang	7
10	Arjasari	11
11	Cimaung	9
12	Pangalengan	13
13	Baleendah	7
14	Dayeuhkolot	6
15	Bojongsoang	6

Lanjutan Tabel 1.3...

No	Kecamatan	Jml. kel/desa
16	Majalaya	11
17	Solokanjeruk	7
18	Ciparay	12
19	Pacet	13
20	Kertasari	7
21	Paseh	12
22	Ibun	12
23	Cileunyi	6
24	Rancaekek	13
25	Cicalengka	12
26	Nagreg	6
27	Cikancung	9
28	Margahayu	5
29	Margaasih	6
30	Cilengkrang	6
31	Cimencyan	9
Total		274

Sumber : Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2008

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dikaji pada wilayah studi ini meliputi identifikasi pusat – pusat pelayanan yang optimal di Kabupaten Bandung yang dimaksudkan untuk rekomendasi dalam penentuan arahan dalam pengembangan wilayah Kabupaten Bandung.

Studi mengenai penetapan pusat – pusat pelayanan di Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa keterbatasan yang merupakan batasan studi yang terdapat dalam penulisan tugas akhir ini adalah **menentukan pusat – pusat pelayanan yang optimal di Kabupaten Bandung dalam rangka pemerataan pengembangan wilayah dengan kaidah *most accessible* berdasarkan kriteria minimasi jarak total (*Aggregat Distance Minimization*) dan minimasi jarak rata – rata (*Average Distance Minimization*)**. Adapun tahapan dalam menentukan pusat-pusat pelayanan yang optimal dilakukan dengan cara mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan yang ada (eksisting) dengan metode orde

kota serta menentukan batas pengaruh dari pusat-pusat pelayanan eksisting tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pusat-pusat pelayanan eksisting di Kabupaten Bandung dalam melayani daerah sekitarnya.

1.5 Metodologi Studi

1.5.1 Metode Pendekatan Studi

Metode Pendekatan dalam Studi Mengenai Optimalisasi Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif dimana analisis ini digunakan untuk menentukan arahan dari setiap pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Bandung dengan beberapa dasar pertimbangan. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan ialah kebijakan, tingkat perkembangan wilayah yang akan menghasilkan pusat-pusat pelayanan eksisting serta jangkauan pelayanan dari setiap pusat-pusat tersebut, kemudian lokasi optimal pusat-pusat pelayanan berdasarkan p-median. Adapun pendekatan masing-masing faktor akan diuraikan sebagai berikut :

a. Faktor Kebijakan

Dalam faktor kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Bandung dengan tujuan agar dalam penentuan pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Bandung tidak menyimpang dari kebijakan-kebijakan yang telah ada di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini dilakukan metode analisis deskriptif sebagai penjelasan dari kebijakan dari yang ada dari tiap tingkatan dalam mengetahui arahan-arahan yang ada untuk Kabupaten Bandung.

b. Faktor Tingkat Perkembangan Wilayah

Dalam faktor ini dilakukan penentuan orde dari tiap masing – masing kecamatan yang dimaksudkan agar dapat mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Bandung terhadap wilayah-wilayah sekitar dengan melihat besar pengaruh dan kemampuan dari tiap – tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Dalam penentuan tingkat dilakukan metode penggabungan dari beberapa faktor yaitu faktor kependudukan, kelengkapan fasilitas, serta aksesibilitas dan mobilitas penduduk.

c. Faktor Batas Pengaruh atau Jangkauan Pelayanan Pusat Eksisting

Dalam indentifikasi pusat-pusat pelayanan peranan batas pengaruh dari tiap pusat pelayanan tersebut menjadi sangatlah penting dikarenakan agar dapat melihat tingkat pemerataan pelayanan dari setiap pusat tersebut. Oleh Karena itu, untuk mengetahui batas pengaruh atau jangkauan pelayanan dari setiap pusat dilakukan dengan melihat dari sisi jarak setiap daerah menuju pusat pelayanan dan kapasitas pelayanannya dengan asumsi bahwa jika jarak suatu kecamatan menuju pusat pelayanan termasuk klasifikasi jauh serta kapasitas pelayanannya rendah maka kecamatan tersebut tidak termasuk kedalam area pelayanan untuk pusat pelayanan eksisting.

d. Faktor Optimalisasi Pusat – Pusat Pelayanan

Adapun dalam optimalisasi pusat – pusat pelayanan disini adalah melakukan analisis lokasi yang paling optimal dengan kriteria minimasi jarak total dan minimasi jarak rata – rata dari setiap kecamatan menuju pusat pelayanan. Hal ini dilakukan karena asumsi masyarakat yang cenderung memilih berangkat atau pergi ke suatu tempat berdasarkan jarak menuju tempat tujuan tersebut. Adapun analisis yang dilakukan dalam penentuan optimalisasi pusat-pusat pelayanan ini yaitu dengan menggunakan metode p-median.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penyusunan laporan ini dilakukan melalui survei, yang secara garis besar dapat terbagi menjadi dua jenis survei yaitu :

1. Pengumpulan data primer

Survei primer yaitu pemerolehan data yang didapat langsung dari hasil survei lapangan dengan cara mengamati objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun bentuk dari survei primer itu sendiri antara lain :

- Wawancara

Wawancara/tanya jawab dilakukan terhadap responden yang dianggap dapat mewakili kelompoknya baik formal maupun non formal, yang

diarahkan agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang tidak terdapat dalam literatur yang terdapat pada instansi yang terkait.

- Kuisisioner

Kuisisioner ini dilakukan dengan memberikan lembar pertanyaan kepada responden guna mendukung data sekunder yang diperoleh, serta sebagai bahan informasi dari tanggapan dari masyarakat secara langsung.

- Observasi lapangan

Observasi lapangan dilakukan dalam rangka pengamatan wilayah yang dipandang dari berbagai segi kegiatan. hal ini dimaksudkan untuk membandingkan antara output yang dihasilkan dengan keadaan sebenarnya dilapangan. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan cara pemotretan dengan maksud untuk memperlihatkan kondisi eksisting dari wilayah tersebut.

2. Pengumpulan data sekunder

Survei sekunder adalah pemerolehan data yang didapat langsung dari instansi – instansi yang terkait serta studi – studi literatur yang berkaitan dengan aspek kajian dari penulisan laporan ini.

Dari beberapa metode pengumpulan data diatas maka metode yang dilakukan oleh penulis dalam laporan ini adalah metode pengumpulan data dengan cara sekunder artinya data diperoleh langsung dari instansi-instansi terkait dengan bentuk laporan serta studi-studi literatur yang berkaitan dengan kajian pada studi ini.

1.5.3 Metode Analisis

Metode analisis yang dilakukan dalam studi mengenai Studi Penentuan Pusat – Pusat Pelayanan di Kabupaten Bandung yaitu :

1. Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan bertujuan untuk melihat kedudukan Kabupaten Bandung serta arahan – arahan yang terdapat didalam kebijakan-kebijakan terkait bagi Kabupaten Bandung. Analisis ini hanya akan meliputi indentifikasi terhadap kebijakan – kebijakan terkait dengan mengetahui arahan-arahan yang terdapat dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Analisis Penentuan Orde Wilayah/Kota

Analisis ini meliputi analisis penggabungan beberapa variabel yaitu tipologi penduduk, kelengkapan fasilitas, serta aksesibilitas. dimana analisis ini merupakan penggabungan nilai dari faktor – faktor tersebut yang nantinya akan menghasilkan orde kota dalam pengukuran tingkat pengaruh tiap – tiap daerah yang dikaji. Adapun penjelasan dari tiap-tiap analisis tersebut adalah :

- Analisis kependudukan dilakukan dengan cara mengukur tingkat jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, dan tingkat pertumbuhan penduduk tiap kecamatan yang diklasifikasikan menjadi tingkat perkembangan penduduk (tipologi) untuk setiap kecamatan.
- Analisis kelengkapan fasilitas dapat dilihat dari jumlah jenis fasilitas yang ada pada setiap daerah kajian dengan cara metode analisis Skala Guttman yang nantinya akan mengeluarkan rangking daripada kelengkapan fasilitas dari setiap kecamatan serta dilanjutkan dengan analisis Indeks bobot sentralitas atau *indeksentralitas*.
- Analisis aksesibilitas dan mobilitas adalah kemudahan mencapai wilayah tersebut dari wilayah yang berdekatan, atau juga sebaliknya kemudahan untuk mencapai wilayah yang berdekatan dengan wilayah asal. Terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi tingkat aksesibilitas untuk menyederhanakan persoalan tersebut maka digunakan faktor jarak pada tiap kecamatan. Pada analisis ini dilakukan persamaan dengan menghitung *index accesibilitas* dari tempat asal (tiap kecamatan) menuju tujuan (Pusat Ibukota). Sedangkan untuk analisis mobilitas penduduk dilakukan dengan pengklasifikasian jumlah pergerakan penduduk pada tiap kecamatan yang dilihat dari tabel matrik asal tujuan.

3. Analisis p-median

Metode p-median adalah metode dalam penentuan lokasi bagi fasilitas pelayanan/pusat pelayanan yang optimal dalam suatu wilayah kemudian diharapkan hasil dari penentuan lokasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh penduduk disekitarnya. Penentuan lokasi optimal ini menjadi sangat penting karena adanya suatu hal yang mendasarkan yaitu

bahwa persebaran penduduk dalam suatu wilayah sangatlah tidak merata. Dalam metoda analisis ini untuk menentukan lokasi pusat pelayanan maka harus ditentukan terlebih dahulu titik – titik permintaan terhadap pusat pelayanan tersebut.

Kaidah yang harus terpenuhi dalam penentuan lokasi optimal ini adalah kaidah *most accessible*. Secara umum kaidah ini dapat diartikan bahwa lokasi yang optimal adalah lokasi yang paling mudah dicapai dibandingkan lokasi lainnya yang ada pada wilayah tersebut. Terdapat kriteria – kriteria yang tercantum dalam kaidah *most accessible* yaitu :

1. Kriteria minimasi jarak
2. Kriteria minimasi jarak rata-rata
3. Kriteria minimasi jarak terjauh
4. Kriteria pembebanan merata
5. Kriteria batas ambang
6. Kriteria batas kapasitas

4. Analisis Penentuan Pusat – pusat Pelayanan

Dalam penentuan keterkaitan antar pusat – pusat pelayanan di Kabupaten Bandung maka dilakukan analisis deskriptif dengan menentukan pusat-pusat pelayanan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang merupakan output dari analisis sebelumnya yaitu analisis kebijakan, analisis orde kota, dan analisis p-median.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian, seharusnya dibuat terlebih dahulu alur pemikiran yang merupakan tahapan – tahapan dari rencana penelitian yang akan dilakukan, maka dari itu dalam laporan tugas akhir ini dibuat suatu kerangka pemikiran yang merupakan rencana penelitian dalam mengkaji pola permukiman Kabupaten Bandung. Adapun untuk alur pemikiran dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.3 dibawah ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam laporan ini meliputi :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisikan tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, metode studi serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori

Dalam bab ini berisikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan pusat-pusat pelayanan diantaranya pengertian wilayah ruang serta perencanaan, teori pengembangan wilayah, konsep pengembangan wilayah, konsep integral ruang, pendekatan desentralisasi wilayah, teori tentang pusat pelayanan, teori tentang metode orde kota, dan fungsional sistem permukiman, serta kajian studi terdahulu.

Bab III Gambaran Umum

Dalam bab ini berisikan tentang kebijakan-kebijakan yang terkait yaitu pada tingkat Nasional, Provinsi, serta Kabupaten. Kemudian berisi juga tentang gambaran umum kondisi eksisting wilayah Kabupaten Bandung dari kondisi fisik dan tata guna lahan, kependudukan, sarana prasarana, serta transportasi.

Bab IV Analisis Penentuan Pusat – pusat Pelayanan

Dalam bab ini berisikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penentuan pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Bandung yaitu indentifikasi kebijakan terkait, penentuan tingkat perkembangan wilayah (pusat pelayanan eksisting) serta jangkauan pelayanannya, dan penentuan lokasi pusat pelayanan yang optimal.

Bab V Kesimpulan

Dalam bab ini berisikan kesimpulan, rekomendasi serta studi lanjutan yang didapat dari hasil uraian sebelumnya.